

**PENGARUH GERAKAN TRANSNASIONAL *WOMEN'S MARCH* TERHADAP KEBIJAKAN KESETARAAN GENDER
DI INDONESIA PADA TAHUN 2017-2018**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S. Sos) dalam bidang Hubungan Internasional**



Oleh:

**MUHAMMAD ZULFADILAH
I72215033**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
JULI 2019**

**PERNYATAAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Zulfadilah
NIM : I72215033
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : **Pengaruh Gerakan Transnasional *Women's March*
Terhadap Kebijakan Kesetaraan Gender Di
Indonesia Pada Tahun 2017-2018**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 30 Juli 2019

Yang menyatakan




Muhammad Zulfadilah
NIM I72215033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zulfadilah

NIM : 172215033

Program Studi : Hubungan Internasional

yang berjudul: **“Pengaruh Gerakan Transnasional *Women’s March* Terhadap Kebijakan Kesetaraan Gender Di Indonesia Pada Tahun 2017-2018”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 30 Juli 2019

Pembimbing



Zaky Ismail, M.S.I

NIP: 198212302011011007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Zulfadilah
NIM : 172215033
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Hub. Internasional
E-mail address : fadhii1297@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pengaruh Gerakan Transnasional Women's March Terhadap

Kebijakan Kesetaraan Gender Di Indonesia Pada Tahun 2017-2018

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2019

Penulis



(Muh. Zulfadilah)
nama terang dan tanda tangan

ke benua lainnya dan tidak terkecuali dengan Indonesia⁷. Berdasarkan hal tersebut, membuat Women's March menjadi suatu gerakan transnasional, hal ini dikarenakan Women's March mampu untuk keluar memberikan pengaruhnya melewati batas-batas negara.

Di Indonesia, aksi dari Women's March ini pertama kalinya dilakukan di Jakarta, pada 4 Maret 2017 yang lalu. Aksi yang terjadi di depan Istana Negara saat itu⁸, telah diikuti kurang lebih sebanyak 700 partisipan yang terdiri dari gabungan berbagai organisasi dan komunitas masyarakat. Dalam aksinya, para peserta aksi mengangkat 8 tuntutan, di antaranya yaitu: (1) menuntut Indonesia kembali menonjolkan budaya toleransi dan keberagaman; (2) pemerintah menciptakan infrastruktur hukum yang berkeadilan gender; (3) pemerintah dan masyarakat memenuhi hak kesehatan bagi perempuan dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; (4) pemerintah dan masyarakat melindungi lingkungan hidup dan pekerjaan bagi perempuan; (5) membangun kebijakan publik yang pro-perempuan dan pro-kelompok marginal lainnya, dalam hal ini termasuk perempuan penyandang difabel; (6) pemerintah dan partai politik meningkatkan kuota keterwakilan dan keterlibatan pihak perempuan di bidang politik; (7) pemerintah dan masyarakat menghormati dan menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok LGBT; (8) pemerintah dan masyarakat lebih

⁷ Nurma Afrinda Prandansari, "Women's March, Gerakan Masif Perempuan Menentang Diskriminasi", diakses pada 29 April 2018, <https://gelorasriwijaya.co/blog/womens-march-gerakan-masif-perempuan-menentang-diskriminasi/#>.

⁸ Rahma Wulandari, "Perjalanan Munira Ahmed, Dari Women's March Hingga Perlawanan Terhadap Politik Identitas", diakses pada 10 Mei 2018, <https://www.femina.co.id/trending-topic/perjalanan-munira-ahmed-dari-women-s-march-hingga-perlawanan-terhadap-politik-identitas>.

yang mengatur mengenai regulasi pembuangan limbah dan tingkat polusi air di Tiongkok. Di sisi lain, Greenpeace juga tidak lupa melakukan kampanye secara global dengan menyampaikannya melalui berbagai macam media sosial populer demi meraih dukungan masyarakat secara global dengan ikut serta dalam gerakan *#PeoplePower* untuk bersama-sama mendukung advokasi transnasional *Greenpeace* di Tiongkok. Menariknya, *Greenpeace* mampu membuat isu polusi air yang menjadi isu domestik di Tiongkok, menjadi isu global sehingga kemudian menjadi suatu isu yang meresahkan bagi masyarakat dunia. Memiliki garis besar yang sama dengan tema yang akan peneliti lakukan, dapat memberi gambaran penting bahwa dalam proses transnasionalisasi tidak lepas dari dukungan perkembangan media sosial dan dukungan masyarakat serta berbagai pihak lainnya, apalagi demi mendesak pemerintah untuk membuat suatu peraturan terkait permasalahan yang dimaksud, pastinya membutuhkan desakan dari masyarakat luas agar permasalahan yang terjadi dapat segera ditangani.

G. Definisi Konseptual

1. Women's March

Women's March merupakan aksi protes yang berawal di Washington D.C. pada tanggal 21 Januari 2017, aksi tersebut dimeriahkan oleh lebih dari setengah juta warga Amerika Serikat di sepanjang jalan Independence Avenue di jantung ibukota Washington

yang kemudian undangan tersebut menghangat hingga ke pengguna Facebook lainnya sehingga menyebabkan munculnya akun-akun lain yang bersedia untuk ikut serta dalam aksi protes tersebut. Setelah itu, mereka mulai menyatukan kekuatan dengan membuat laman Facebook resmi yaitu "*Women's March on Washington*" yang kemudian membuat ribuan perempuan lainnya di seluruh wilayah Amerika Serikat menandatangani petisi dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam aksi protes tersebut.⁵⁴

Hangatnya perkembangan isu hak-hak perempuan di Amerika Serikat kala itu tidak muncul tanpa alasan, hal ini dikarenakan adanya sikap dari Donald Trump yang dianggap diskriminatif-agresif dan sengaja mengabaikan hak asasi manusia, khususnya dalam isu gender sehingga membuat beberapa kelompok masyarakat merasa terpojokkan dan memicu kemarahan dari masyarakat Amerika.

Aksi protes akhirnya dilakukan setelah beberapa jam Donald Trump dilantik sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-45. Dalam aksinya, aksi protes saat itu tidak hanya diwarnai oleh masyarakat biasa akan tetapi juga datang dari kalangan selebriti, antara lain aktivis feminis Gloria Steinem, penyanyi Cher, bintang film America Ferrera, Ashley Judd, Chloe Graze Moretz, Jessica Chastain, Bella Thorne,

⁵⁴ Nurma Afrinda Prandansari, "Women's March, Gerakan Masif Perempuan Menentang Diskriminasi", diakses pada 29 April 2018, <https://gelorasriwijaya.co/blog/womens-march-gerakan-masif-perempuan-menentang-diskriminasi/#>.

Donald Trump berjanji akan menjalankan pemerintahan yang mewakili seluruh harapan dari sebagian besar masyarakat Amerika Serikat, pada saat ia mengungkapkannya dalam pidato pelantikannya pada Jumat, 20 Januari 2017 yang lalu. Akan tetapi pada Sabtu, 21 Januari 2017, para pengunjung rasa tidak percaya akan apa yang telah Donald Trump sampaikan pada saat pidato pelantikannya dibacakan. Marta Conte, seseorang yang mengaku berasal dari Partai Republik merupakan salah satu dari sekian banyak pengunjung rasa yang hadir pada hari itu, secara terang-terangan ia mengatakan bahwa Donald Trump sama sekali tidak mewakili nilai-nilai yang diyakininya dan juga nilai-nilai yang dipegang oleh Partai Republik dimana ia bergabung pada 35 tahun yang lalu. Saat itu Conte mengatakan, “saya sangat ingin mengaktifkan kembali kelompok moderat di dalam Partai Republik untuk mengambil alih partai. Sistem dua partai untuk saat ini tidak berfungsi ketika salah satu atau kedua pihak sama-sama terlalu ekstrem”.⁶²

Suksesnya aksi *Women's March on Washington DC* kala itu tidak lepas dari peran empat inisiator perempuan, yakni Carmen Perez yang dalam kesehariannya berfokus pada isu-isu sosial menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan keadilan gender; Bob Bland yang berprofesi sebagai pengusaha muda dengan dobrakannya terhadap sistem industri busana di Amerika dengan memerhatikan aspek keadilan buruh, ramah lingkungan dan berkelanjutan; Tamika D.

⁶² Eva Mazrieva, “Protes ‘Women’s March’ di Washington Guncang Dunia”, diakses pada 29 April 2018, <https://www.voaindonesia.com/a/protes-womens-march-washington-guncang-dunia/3686721.html>.

Dipilihnya isu otonomi tubuh sebagai salah satu tema utama dalam tuntutan aksi protes saat itu dilatar belakangi karena makin tinggi bentuk pelecehan maupun kekerasan yang dialami oleh perempuan akibat menjadikan tubuh perempuan sebagai suatu objek. Hal ini juga turut diungkapkan oleh Azrina Manalu selaku Ketua Komnas Perempuan, ia mengatakan “Jika bicara soal otonomi tubuh, ini sangat dekat dengan situasi kekerasan terhadap perempuan yang semakin hari kita tahu angkanya semakin meningkat terutama di ranah privat yakni dalam keluarga dan relasi personal lainnya”.⁹²

Seperti yang kita ketahui bahwa pelecehan seksual masih sering kali dianggap sebagai isu yang tidak penting oleh masyarakat Indonesia. Padahal sebenarnya otonomi tubuh dengan pelecehan seksual adalah dua hal yang memiliki keterkaitan sangat erat, hal ini disebabkan karena pelecehan seksual adalah tindakan yang sering kali dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan sering kali membuat kaum perempuan tidak merasa aman dan nyaman untuk berada di ruang publik. Hal ini dikarenakan karena pelecehan seksual dapat menyebabkan korban tanpa sadar melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri, seperti apa yang biasanya dilakukan seseorang dalam menilai benda, sehingga kondisi ini membuat korban menganggap dirinya adalah sebuah objek dan bukanlah sebagai seorang manusia. Hal ini juga berlaku pada kaum pria dimana kondisi membuat mereka turut menjadikan kaum perempuan sebagai objek. Berdasarkan hal

⁹² “*Women’s March 2018 Tekankan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan*”, UCAN Indonesia, diakses pada 8 Agustus 2019, <https://indonesia.ucanews.com/2018/03/06/womens-march-2018-tekankan-perlindungan-hukum-bagi-perempuan/>.

5. Menuntut pemerintah agar membuat kebijakan publik yang pro-perempuan dan pro-kelompok marginal lainnya.
6. Menuntut kepada pemerintah dan partai politik agar meningkatkan keterwakilan dan keterlibatan perempuan di bidang politik.
7. Menuntut pemerintah dan masyarakat untuk menghormati dan menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap kelompok LGBT.
8. Menuntut pemerintah dan masyarakat agar lebih memperhatikan isu-isu global yang memiliki dampak pada kaum perempuan serta turut membangun solidaritas dengan kaum perempuan di seluruh dunia.¹⁰³

Demi mencapai tujuannya, para peserta demonstrasi memanfaatkan jalannya aksi protes pada *event Women's March Jakarta* kala itu dengan berama-ramai turun ke jalan, hal tersebut ditandai dengan terlibatnya kurang lebih 700 patisipan dalam gelombang massa yang terdiri dari gabungan komunitas-komunitas yang berfokus pada isu hak asasi manusia dan juga dari keterlibatan masyarakat yang sadar akan isu-isu sosial berbasis gender,¹⁰⁴ komunitas-komunitas tersebut diantaranya terdiri dari LBH, *PeaceWomen Across the Globe*, Solidaritas Perempuan Indonesia dan Koalisi Perempuan Indonesia.¹⁰⁵ Aksi *march* yang dilakukan oleh

¹⁰³ Anna Christi Suwardi, “Belajar Dari Gerakan Women’s March Washington”, diakses pada 14 Mei 2018, <https://geotimes.co.id/kolom/sosial/belajar-dari-gerakan-womens-march-washington/>.

¹⁰⁴ Nurma Afrinda Prandansari, “Women’s March, Gerakan Masif Perempuan Menentang Diskriminasi”, diakses pada 29 April 2018, <https://gelorasriwijaya.co/blog/womens-march-gerakan-masif-perempuan-menentang-diskriminasi/#>.

¹⁰⁵ Lisa Siregar, “Activists to March in Jakarta to Demand Equal Rights for Women”, diakses pada 4 Juli 2019, <https://jakartaglobe.id/culture/activists-to-march-in-jakarta-to-demand-equal-rights-for-women/>.

pada tahun 2015 menyebutkan terdapat 18 kasus pelecehan seksual pada pekerja migran Indonesia. Selain itu, menurut laporan Komnas Perempuan bahwa pada tahun 2017 tercatat telah terjadi sebanyak 10 kasus kekerasan terhadap PRT maupun pekerja migran.¹⁰⁷

Tidak hanya itu saja, kasus-kasus kekerasan yang menimpa pekerja dan buruh wanita terus bermunculan. Berdasarkan laporan pada siaran pers BNP2TKI Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) selama tahun 2013-2018 telah terjadi sebanyak 192 kasus buruh migran perempuan asal NTT yang meninggal dunia. Selain itu juga terdapat fakta bahwa mereka rawan akan terjatuh ke tangan sindikat perdagangan manusia (*Human Trafficking*).¹⁰⁸ Dengan demikian, aksi *Women's March Jakarta 2017* kala itu turut dimanfaatkan oleh para pengunjuk rasa dalam mengangkat isu-isu kekerasan terhadap pekerja dan buruh wanita yang selama ini masih menjadi polemik dan tak kunjung selesai, sekaligus mendesak pemerintah Indonesia untuk segera membuat kebijakan yang melindungi lingkungan hidup dan kerja PRT maupun buruh wanita berbasis HAM.

Desakan dan aksi protes pengunjuk rasa dalam menuntut diwujudkannya perlindungan terhadap buruh migran berbasis HAM dan kesetaraan gender pada *Women's March Jakarta 2017* tidaklah sia-sia. Setelah melalui proses revisi yang panjang, kurang lebih

¹⁰⁷ “Menguak Data Jumlah Kekerasan Perempuan Tahun ke Tahun”, CNN Indonesia, diakses pada 8 Juli 2019, <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181126110630-284-349231/menguak-data-jumlah-kekerasan-perempuan-tahun-ke-tahun>

¹⁰⁸ Nurma Afrinda Prandansari, “Women’s March, Gerakan Masif Perempuan Menentang Diskriminasi”, diakses pada 29 April 2018, <https://gelorasriwijaya.co/blog/womens-march-gerakan-masif-perempuan-menentang-diskriminasi/#>.

selama 7 tahun proses pembahasan, *Women's March* turut mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menggantikan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri,¹⁰⁹ selain itu aktivis *Women's March* juga turut mendukung Organisasi Pekerja Migran dalam hal advokasi.¹¹⁰ Isi tuntutan dan desakan yang diangkat oleh aktivis *Women's March* kemudian ditampung oleh DPR dan kemudian dijadikan pertimbangan pada perundingan perumusan UU. Akhirnya pada 25 oktober 2017, melalui Sidang Paripurna DPR-RI, UU tentang Perlindungan Pekerja Migran akhirnya disahkan menjadi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.¹¹¹

Pada UU No. 18 Tahun 2017 terdapat poin-poin yang diantaranya mengenai: (1) jaminan bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Hal ini dikarenakan bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dijamin penegakannya; (2) Pekerja Migran Indonesia mendapatkan perlindungan dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan, korban kekerasan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lainnya yang tidak sesuai

¹⁰⁹ Sekretariat Migrant care, “*Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja migran Indonesia*”, diakses pada 9 Juli 2019, <http://www.migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>.

¹¹⁰ Kate Walton, pesan e-mail kepada penulis, 5 Agustus 2019.

¹¹¹ Sekretariat Migrant care, “*Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja migran Indonesia*”, diakses pada 9 Juli 2019, <http://www.migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>.

Amerika Serikat yang ke-45, akibat ujaran diskriminasi terhadap kaum perempuan dan kelompok marginal lainnya yang sempat ia lontarkan pada pidato pelantikannya saat itu. Pusat aksi protes terjadi di Washington DC pada 21 Januari 2017 dan beberapa aksi lanjutan di beberapa kota besar seperti San Fransisco, New York dan Boston. Selain itu, berdasarkan jalannya aksi protes kala itu, berhasil menjadikannya sebagai gerakan massa terbesar di Amerika Serikat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.¹²²

Besarnya antusiasme masyarakat luas dalam merespon aksi *Women's March* kala itu, berhasil membuat suatu efek domino. Efek domino yang dimaksud adalah karena aksi protes tidak hanya terjadi di Amerika Serikat saja. Gelombang kelompok masyarakat, yang sebagian besarnya terdiri dari pekerja dan mahasiswa asal Amerika Serikat yang tinggal di Perancis, melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Menara Eiffel Paris.

Selain di Perancis, gerakan sosial *Women's March* juga terjadi di negara Indonesia. Di Indonesia, aksi protes serupa turut terjadi yang ditandai dengan diselenggarakannya *Women's March Indonesia* untuk pertama kalinya pada 4 Maret 2017 yang lalu di Jakarta.

Berdasarkan efek domino yang diberikan dari terselenggaranya *Women's march* secara global, menjadikan gerakan ini sebagai suatu Gerakan Transnasional. Hal ini dikarenakan *Women' March* sesuai dengan definisi dari sebuah Gerakan Transnasional yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, yaitu suatu upaya dari kelompok-kelompok dan penganut

¹²² Anna Christi Suwardi, "Belajar Dari Gerakan Women's March Washington", diakses pada 14 Mei 2018, <https://geotimes.co.id/kolom/sosial/belajar-dari-gerakan-womens-march-washington/>.

tertentu di lebih dari satu negara yang memiliki komitmen untuk melakukan suatu tindakan kontroversial demi mencapai tujuan bersama ataupun tujuan yang diinginkan, yang dalam prosesnya seringkali melawan stigma masyarakat luas, pemerintah, lembaga internasional, maupun perusahaan swasta.¹²³

Selain itu, dengan diselenggarakannya aksi *Women's March Indonesia* yang dilakukan secara kolektif oleh kelompok yang berfokus pada isu perempuan dan diskriminasi berbasis gender, membuat gerakan ini sesuai dengan perspektif dalam teori Feminisme Liberal. Para aktivis menghadirkan sebuah wadah bagi siapa saja yang ingin menyuarakan tuntutan mereka terhadap pemerintah dan juga masyarakat terkait isu-isu perempuan, isu kekerasan berbasis gender dan kelompok marginal lainnya.

Pada aksi tuntutan mereka, para aktivis *Women's March Indonesia* menuntut kepada pemerintah dan masyarakat agar dihapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, menghadirkan hukum yang berkeadilan gender, menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan menempatkan posisi perempuan ke tempat sebaik-baiknya dalam sistem sosial. Dengan demikian, gerakan ini mengusung konsep Feminisme liberal dalam praktiknya, karena menurut kelompok Feminisme Liberal, kaum perempuan juga memiliki hak untuk berperan di dalam kehidupan sosial dan mereka berupaya agar status kaum perempuan memiliki tempat yang sebaik-baiknya.¹²⁴

¹²³ Jorg Balsiger, "Transnational Social Movement", diakses pada 11 Juni 2019, <https://www.britannica.com/topic/transnational-social-movement>.

¹²⁴ Yohannes Sulaiman dalam Irene Noviyanti Dewi, "*Feminisme Liberal*", diakses pada 18 Maret 2019, https://www.academia.edu/23133470/FEMINISME_LIBERAL.

bertentangan dengan perspektif gender, sehingga dengan disahkannya PERMA No. 5 Tahun 2018 dipastikan tidak akan ada lagi aksi menyalahkan maupun menyudutkan korban kekerasan seksual tanpa memandang korban berdasarkan jenis kelaminnya. Dengan demikian, kebijakan ini merupakan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender karena dalam perlindungannya tidak membedakan manusia berdasarkan jenis kelaminnya, sehingga menciptakan kondisi yang berkeadilan gender dan sesuai dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti meyakini bahwa *Women's March* yang mengusung konsep Feminisme Liberal mengupayakan agar perempuan mendapatkan tempat yang layak dalam kehidupan sosial. Upaya tersebut dilakukan melalui aksi gerakan yang mengusung gerakan sosial transformatif yang bertujuan mengubah pola pikir masyarakat dalam memandang dan memperlakukan perempuan dan kelompok marginal lainnya. Dalam menjalankan aksinya, para aktivis mengangkat tuntutan-tuntutan kepada pemerintah dan masyarakat demi menciptakan keadaan dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Dengan demikian, kondisi dimana laki-laki maupun perempuan mendapatkan perlakuan yang sama dapat tercapai, sehingga kesetaraan gender dalam kehidupan sosial pada akhirnya dapat terealisasi.

masyarakat Indonesia. Pada praktiknya, salah satu tuntutan yang diangkat oleh *Women's March Indonesia* adalah mendesak pemerintah untuk segera menghadirkan sebuah kebijakan yang melindungi Pekerja Migran Indonesia, melalui aksi demonstrasi, pembuatan petisi dan mendukung LSM dalam hal advokasi khususnya dukungan terhadap Organisasi Pekerja Migran. Pada akhirnya desakan yang terus dilakukan oleh aktivis akhirnya membuahkan hasil dengan pengesahan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berselang satu tahun. *Women's March Indonesia 2018* kembali digelar. Tidak hanya di Jakarta, aksi demonstrasi kala itu juga diselenggarakan di 12 kota lainnya, yaitu Bandung, Surabaya, Malang, Salatiga, Yogyakarta, Serang, Denpasar, Lampung, Kupang, Pontianak, Sumba, dan Tondano. Membawa 8 tuntutan dengan lebih berfokus terhadap isu-isu kekerasan berbasis gender, para aktivis kembali mendesak kepada pemerintah dan juga masyarakat untuk menghapus segala bentuk diskriminasi berbasis gender di segala aspek kehidupan dan menghadirkan peraturan yang mendukung kesetaraan gender, serta kembali mendukung LSM-LSM dalam hal advokasi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan dilakukan pemerintah. Pada akhirnya turut memberikan hasil dengan disahkannya PERMA No. 5 Tahun 2018 tentang tata cara melakukan acara pidana terhadap korban kekerasan seksual.

- <https://gelorasriwijaya.co/blog/womens-march-gerakan-masif-perempuan-menentang-diskriminasi/#>.
- Ainin. “*Metode Penelitian*”. diakses pada 28 Mei 2019. <http://repository.unpas.ac.id/30689/5/BAB%20III.pdf>.
- Balsiger, Jorg. “*Transnational Social Movement*”. diakses pada 11 Juni 2019. <https://www.britannica.com/topic/transnational-social-movement>.
- CNN Indonesia. “*Menguak Data Jumlah Kekerasan Perempuan Tahun ke Tahun*”. diakses pada 8 Juli 2019. <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181126110630-284-349231/menguak-data-jumlah-kekerasan-perempuan-tahun-ke-tahun>.
- Dewi, Irene Noviyanti. “*Feminisme Liberal*”. diakses pada 18 Maret 2019. https://www.academia.edu/23133470/FEMINISME_LIBERAL.
- Firman. “*Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*”. diakses pada 20 Juni 2019. https://www.researchgate.net/publication/328675958_Analisis_Data_dalam_Penelitian_Kualitatif.
- Fatmawati, E. “*Metode Penelitian*”. diakses pada 20 Juni 2019. http://eprints.undip.ac.id/40650/3/BAB_III.pdf.
- Gender Equality. “*What is Gender Equality?*”. diakses pada 11 Juni 2019. <http://www.genderequality.ie/en/GE/Pages/WhatisGE>.
- Indonesia, Voxpop. “*Women’s March Dalam Jepletan Kamera*”. diakses pada 10 Mei 2018. <http://voxpath.id/womens-march-2018/>.
- JA, Denny dalam A Nugraha. “*Gerakan Sosial*”. diakses pada 26 Maret 2019. http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14715/2/T1_352011603_BAB%20II.pdf.

- JogloAbang. “*Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*”. diakses pada 9 Juli 2019.
<https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-nomor-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>.
- KBBI. “*Transnasional*”. diakses pada 25 Maret 2019.
- Mazrieva, Eva. “Protes ‘Women’s March’ di Washington Guncang Dunia”. diakses pada 29 April 2018. <https://www.voaindonesia.com/a/protes-womens-march-washington-guncang-dunia/3686721.html>.
- Mubtadi, Vina. “*Diaspora Indonesia Ikut dalam Women’s March*”. diakses pada 14 Mei 2018. <https://www.voaindonesia.com/a/diaspora-ikut-dalam-womens-march/3687158.html>
- Nugraha, A. “*Gerakan Sosial*”. Diakses pada 26 Maret 2019.
http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14715/2/T1_352011603_BAB%20II.pdf.
- Ningrum. “*Metode Penelitian*”. diakses pada 18 Maret 2019.
<http://eprints.ums.ac.id/34000/8/BAB%20III.pdf>.
- Prandansari, Nurma Afrinda. “*Women’s March, Gerakan Masif Perempuan Menentang Diskriminasi*”. diakses pada 29 April 2018.
<https://gelorasriwijaya.co/blog/womens-march-gerakan-masif-perempuan-menentang-diskriminasi/#>.
- Putri, Restu Dianti. “RUU PKS: Dijinakkan Pemerintah, Lamaban di DPR”. diakses pada 8 Agustus 2019. <https://tirto.id/ruu-pks-dijinakkan-pemerintah-lamban-di-dpr-cAzn>.

- Prihandhini. "Tuntutan Perempuan Indonesia Di Women's March Jakarta 2017". diakses pada 8 Agustus 2019. <https://womantalk.com/news-update/articles/tuntutan-perempuan-indonesia-di-womens-march-jakarta-2017-D40NO>.
- Pawestri, Tunggal. "Menghentikan Kebencian dan Kekerasan Terhadap LGBT". diakses pada 8 Agustus 2019. <https://www.dw.com/id/menghentikan-kebencian-dan-kekerasan-terhadap-lgbt/a-19515331-0>.
- Puspitasari, Dia. "*Gerakan Perempuan Melawan Korporasi Tambang*". diakses pada 26 Maret 2019. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntsbdcee9dd19full.pdf>.
- Puspitawati, Herein. "*Konsep- Teori dan Analisis Gender*". diakses pada 17 Maret 2019. <http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf>.
- Rahayu, Wewen Kusumi. "*Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)*". *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*. Vol. 2, No. 1, Juni 2016.
- Sarahtika, Dhania. "*The Women Behind Women's March Jakarta*". diakses pada 28 Mei 2019. <https://jakartaglobe.id/culture/women-behind-womens-march-jakarta/>.
- Sekretariat Migrant care. "*Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja migran Indonesia*". diakses pada 9 Juli 2019. <http://www.migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>.

- Suwardi, Anna Christi. "*Belajar Dari Gerakan Women's March Washington*". diakses pada 14 Mei 2018. <https://geotimes.co.id/kolom/sosial/belajar-dari-gerakan-womens-march-washington/>.
- Suwastini, Ni Komang Arie. "Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 2 No.1.
- Siregar, Lisa. "*Activists to March in Jakarta to Demand Equal Rights for Women*". diakses pada 4 Juli 2019. <https://jakartaglobe.id/culture/activists-to-march-in-jakarta-to-demand-equal-rights-for-women/>.
- UCAN Indonesia . "*Women's March 2018 Tekankan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan*". diakses pada 8 Agustus 2019. <https://indonesia.ucanews.com/2018/03/06/womens-march-2018-tekankan-perlindungan-hukum-bagi-perempuan/>.
- Voxpop Indonesia. "*Women's March Dalam Jepletan Kamera*". diakses pada 10 Mei 2018. <http://voxpath.id/womens-march-2018/>.
- Wulandari, Rahma. "*Perjalanan Munira Ahmed, Dari Women's March Hingga Perlawanan Terhadap Politik Identitas*". diakses pada 10 Mei 2018. <https://www.femina.co.id/trending-topic/perjalanan-munira-ahmed-dari-women-s-march-hingga-perlawanan-terhadap-politik-identitas>.
- Wafa. "*Analisis Wacana Kritis Kesetaraan Gender Pada Akun Instagram Women's March Indonesia 2018*". diakses pada 17 Maret 2019. repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42746/1/WAFA-FDK.pdf.